

*what we have here perceived as truth  
we shall some day encounter as beauty*

## siaran pers

**what we have here perceived as truth  
we shall someday encounter as beauty\***

pameran tunggal FX Harsono  
dikuratori oleh Hendro Wiyanto

### LOKASI

Jogja National Museum (lantai 2)  
Jl. Prof. Ki Amri Yahya 1  
Yogyakarta

### PEMBUKAAN PAMERAN

Senin, 1 Juli, 19.30 WIB

### WAKTU

1 – 22 Juli 2013  
Buka setiap hari  
(10.00 – 21.00 WIB)

### AGENDA

Pesta teh dan tur pameran oleh Hendro Wiyanto  
Sabtu, 6 Juli, 16.30 WIB

Tur pameran oleh Grace Samboh  
Jumat, 12 Juli, 16.30 WIB

Diskusi dan tur pameran oleh FX Harsono  
Sabtu, 20 Juli, 16.30 WIB

Konfirmasikan kehadiran Anda pada Nn. Mara di  
poke@hyphen.web.id atau +6289671801546

*\*) Pembalikan dari pernyataan Schiller (1788-1805),  
"What we have here perceived as beauty/ we shall some day encounter as truth."*

Penindasan tidaklah berakhir ketika bendera nasional dikibarkan. Dunia mengingat ujaran itu sebagai kata-kata seorang pemimpin bangsa terjajah. Kisah sejarah tidak pula berakhir ketika cerita dianggap usai. Begitulah, makna masa lalu tidaklah habis dalam kesadaran masyarakat ketika zaman baru tiba, ujar seorang sejarawan.

Banyak seniman Indonesia yang memiliki "kesadaran politik" yang menonjol di masa lalu sampai sekarang ini. Kesadaran itu telah menghela mereka sedikit banyak pada pengertian bahwa terutama para elit politiklah yang telah menentukan atau mendominasi bagian paling penting dari jelujur sejarah bangsanya sendiri. Di tangan merekalah, sejarah menjadi politik, menjadi "sejarah politik". Sejarah semacam itu seakan-akan telah dinyatakan sebagai versi terakhir setelah direka *di ujung pena*, ditipu *di ujung senapan*, atau tersapu *di ujung pancuran sejarah*. Kata-kata puitis mengenai operasi kekuasaan sejarah politik yang hegemonik itu memendar dari baris-baris teks dengan cahaya kemerahan yang ditulis oleh FX Harsono (Blitar, Jawa Timur, Indonesia, 1949) untuk salah satu karyanya dalam pameran ini.

Harsono adalah seniman yang tertarik pada bagaimana wacana-wacana besar seperti sejarah itu telah diguratkan. Baginya, terutama peluang untuk menyemaikan narasi-narasi sejarah "yang lain" menjadi lebih terbuka pasca-1998. Tahun keramat itulah yang menandai perubahan situasi sosial-politik di Indonesia, setelah pernyataan mundurnya Soeharto sebagai orang nomor satu, pada Kamis, 21 Mei 1998. Seperti ujaran yang diucapkan oleh seorang cendekiawan Indonesia pada momen pergantian itu, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan yang baru", maka bagi Harsono, momen perubahan itu juga menandai datangnya "musim semi" penciptaannya sendiri.

Pemerhati seni rupa di Indonesia kini paham salah satu konteks penting yang melatarbelakangi kekaryaan FX Harsono pasca-1998 adalah perhatiannya yang khidmat pada cerita-cerita kecil di luar "sejarah nasional" yang dianggap benar dan besar. Kisah-kisah itu berawal dari narasi biografis, nama "asli", asal-usul, kisah keluarganya sendiri, dan pengalaman pribadinya sebagai seorang keturunan Tionghoa di tengah masyarakat.

Sebuah album peninggalan ayahandanya tak dinyana merupakan sebuah dokumen mahapenting tentang para korban, orang-orang Cina di sekitar kota kelahirannya yang dirampok dan dibunuh pada masa aksi-polisional menjelang akhir 1940-an. Kepekaan Harsono yang terasah sejak lama sebagai seniman yang melibatkan seninya pada diskursus sosial-politik mendorongnya lebih jauh, kepada kesadaran akan pentingnya apa yang bisa disebut sebagai "kebenaran kronikel" sebuah peristiwa. Yakni, apa, bila, di mana dan siapa para korban yang sebagian besar tak bernama itu. (Taufik Abdullah; 1997).

Proyek ini terus berlanjut, seakan-akan mereka, para korban itu telah menjeratnya ke dalam sebuah lorong yang diujungnya menjanjikan sebuah titik cahaya. Pada pameran ini Harsono menunjukkan kepada kita "aktivisme"-nya menziarahi para korban dan dengan keinginan tahu yang sangat besar menyusuri cerita-cerita atau jalur kekacauan di sekitar masa kedatangan Belanda yang kedua kalinya itu, di sekitar 1947-1948. Ia menemukan makin banyak nama, narasumber, lokasi dan makna peristiwa itu melalui percakapan dengan keluarga korban, saksi yang masih hidup dan para ahli sejarah, selain tentu saja kuburan yang bisu, dari beberapa kota kecil di Jawa Tengah sampai Jawa Timur.

Disadarinya, kisah-kisah itu niscaya tenggelam atau dilupakan oleh "sistem-sistem etik" sejarah besar yang sarat oleh slogan-slogan nasionalistis. Mereka yang meragukan diskursus sejarah yang seakan-akan



*what we have here perceived as truth  
we shall some day encounter as beauty*

memiliki keabsahan pendasaran, akan mengatakan, bahwa kini kita tidak hidup di dalam sistem seperti itu, melainkan di dalam apa yang disebut sebagai “moralitas.

Ia berasal dari keluarga etnis Tionghoa yang lahir dan besar Indonesia, mengalami masa-masa ketika rezim Orde Baru (1966-1998) menancapkan politik represifnya terhadap kebudayaan yang diberi stigma sebagai asing, yang praktiknya tidak pernah dianggap cocok dengan kepribadian nasional Indonesia. Di masa yang lebih jauh, sebagai warisan dari kebijakan politik di masa kolonial, kehadiran orang-orang Cina di Indonesia selalu juga diprasangkai sebagai komprador asing, tidak cukup “asli”, “non-pribumi”, bukan kelompok nasionalis dan bahkan dipandang sebagai sebuah ancaman tersendiri dalam kompetisi berbagai bidang kehidupan. “Geger” mengenai orang-orang Cina di Indonesia, -terutama pada masa setelah Kemerdekaan Indonesia 1945- menunjukkan bagaimana kerawanan soal itu dapat dipelintir sebagai kesahihan *politicking* untuk menggiring “sang kambing hitam” di depan altar para korban.

Harsono menemukan berbagai fakta mengenai peran orang-orang Cina dalam kehidupan politik, bahkan dalam lembaga politik penting pra-kemerdekaan seperti misalnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI, 1945), yang melibatkan sejumlah nama tokoh Tionghoa. Baginya, orang-orang Tionghoa di Indonesia, sejak lama bukanlah “*part-of-no-part*” untuk meminjam istilah terkenal yang pernah digunakan oleh Rancière, misalnya. Pada sidang BPUPKI, 1 Juni 1945 itulah, antara lain seorang tokoh bernama Sukarno –kelak menjadi Presiden Pertama Indonesia– berpidato mengenai rumusan Pancasila, lima dasar negara yang sebagian besar digunakan sebagai rujukan foundational Negara Republik sampai sekarang. Sastra Melayu-Tionghoa, misalnya bagi Harsono bukanlah “*part-of-no-part*” dari khasanah resmi sastra Indonesia, yang dipraktikkan oleh para penulis Tionghoa sejak lama.

Di dalam keteguhan akan konteks naratif-moralistik yang sarat oleh belarasa terhadap para korban yang tak bernama itulah, Harsono mengalami musim semi ziarahnya sendiri, dalam trauma personal dan kritiknya terhadap teks-teks “sejarah” besar, dengan tekstualitas dan metafora puitis yang digubahnya sendiri. Prosa pencariannya akan narasi-narasi “kebenaran” mengenai jejak-jejak yang terlupakan itu, kelak dapat dimaknai sebagai menjelang datangnya keindahan musim semi...

**Untuk mengunduh foto karya dan dokumentasi pameran, sila klik tautan berikut:**

Resolusi rendah (72 dpi) <http://www.mediafire.com/?7f6ua19hc14uc8b>

Resolusi tinggi (300 dpi) <http://www.mediafire.com/?okg4i5ixj81qgsm>

Kredit foto: Budi Laksono, Dian KM, Dwi Oblo, dan FX Harsono

**Untuk info lebih lanjut, hubungi:**

Ratna Mufida (Hyphen)

m. +62817277679

e. [ratnamufida@yahoo.com](mailto:ratnamufida@yahoo.com)

e. [poke@hyphen.web.id](mailto:poke@hyphen.web.id)